

ABSTRAK

Caroline Pandin. ABSTRACT This study aims to analyze the relationship between the regional executive (Regional Government) and the regional legislature (Regional People's Representative Council) as well as the factors that influence the formation of the Tomor Birip District and the Sor Ep District in Asmat Regency. Based on the theory, the distribution of power, political representation, local government and the relationship between the legislature and executive in local government, observations of these things occur in Asmat District and local community representatives using a qualitative approach method. Data collection was carried out using interview techniques, document study, and observation. Interviews were conducted with respondents representing the Regional People's Legislative Assembly and the Regional Government. The results of the study show that the relationship between the legislature and the regional executive in the process of discussing and enacting regional regulations is reciprocal. In Law Number 32 of 2004, which was subsequently amended to Law Number 23 of 2014, it is emphasized that in the process of forming the Tomor Birif District and Sor Ep District, the Regional People's Legislative Council and the local government do not dominate each other, however the Regional People's Representative Council is still has not been fully able to keep up with the Regional Government, especially due to internal reasons for members of the Regional People's Legislative Assembly such as level of education and experience, other factors that influence the relationship between the executive and legislature in the Formation of vi the Tomor Birif District and the Sor Ep District are communication and political interests. The existence of a relationship of communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create good relations in accommodating the various aspirations and interests of the community.

Keywords : executive, legislative, reciprocal, regulation

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Distrik Tomor Birip dan Distrik Sor Ep di Kabupaten Asmat. Berdasarkan teori, pembagian kekuasaan, keterwakilan politik, pemerintahan daerah dan hubungan antara legislatif-eksekutif dalam pemerintahan daerah, pengamatan terhadap hal-hal tersebut terjadi di Kabupaten Asmat dan perwakilan masyarakat lokal dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbaharui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam vii proses pembentukan Distrik Tomor Birif dan Distrik Sor Ep, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemerintah Daerah terutama karena alasan internal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam Pembentukan Distrik Tomor Birif dan Distrik Sor Ep adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan hubungan yang baik dalam mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Kata kunci : legislative, eksekutif, resiprokal, peraturan